



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 793/X/2013

IV/OKTOBER 2013



SEAPAC Hasilkan Empat Isu Utama Deklarasi Medan



KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEEMPAT OKTOBER 2013

Minggu keempat bulan Oktober, kegiatan Dewan ditandai dengan Rapat Paripurna 22 Oktober 2013 mengenai Laporan Komisi III mengenai hasil pembahasan dan persetujuan terhadap Calon Kapolri dan laporan Baleg mengenai penarikan RUU dari daftar prolegnas, serta kegiatan AKD lainnya. Sidang Umum SEAPAC di Medan juga mewarnai kegiatan DPR minggu ini.

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alié

Rapat Paripurna 24 September

Rapat Paripurna 22 Oktober 2013 mengagendakan dua acara, pertama, yaitu Laporan Komisi III mengenai pembahasan dan persetujuan terhadap Calon Kapolri. Proses uji kelayakan terhadap Calon Kapolri Komjend. Pol. Drs. Sutarman merupakan komitmen Komisi III dalam melakukan penilaian dan kesungguhan terhadap Calon Kapolri sebagai calon pemimpin yang menduduki posisi strategis di bidang keamanan dan ketertiban NKRI. Berdasar keputusan Rapat komisi III tanggal 7 Oktober 2013, Komisi III melalui pandangan fraksi-fraksi secara musyawarah dan mufakat menyetujui untuk mengangkat Komjend Pol Drs. Sutarman sebagai Kepala Kepolisian RI dan selanjutnya menyetujui untuk memberhentikan Jend Pol Drs. Timur Pradopo sebagai Kapolri. Komisi III menyadari dan memahami bahwa kecakapan, integritas dan kompetensi Calon Kapolri merupakan prasyarat mutlak untuk menjadi Kapolri. Atas dasar itu, Komisi III menyetujui untuk mengangkat Calon Kapolri Komjend Pol Drs. Sutarman, dengan harapan bahwa Calon Kapolri terpilih, sungguh-sungguh dapat dan mampu meningkatkan citra dan wibawa lembaga Polri sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Acara kedua, Laporan Baleg mengenai penarikan RUU dari daftar Prolegnas, dilaporkan oleh Wakil Ketua Baleg hasil rapat koordinasi Baleg dengan Menkumham RI dalam



rangka penarikan 2 RUU dalam prolegnas dari rancangan RUU Prioritas tahun 2013. Yaitu RUU tentang perubahan atas UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dalam proses penyusunan/sebelum menjadi usul DPR, dan RUU tentang Percepatan Pembangunan Percepatan Daerah Tertinggal (PPDT), dalam proses pembahasan tingkat I.

Sesuai dengan Prolegnas RUU Prioritas 2013, perubahan RUU Pilpres disiapkan oleh Baleg, dan sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan DPR-RI tentang Tata Cara penarikan RUU, menegaskan bahwa RUU yang berasal dari DPR atau Presiden dapat dilakukan penarikan dalam proses penyusunan dan pembahasan. Pasal 5 Ayat 1 menegaskan bahwa penarikan RUU sebelum RUU diputus menjadi RUU DPR, dilakukan oleh anggota, komisi, gabungan Komisi,

Baleg atau DPD-RI. Sehubungan dengan itu, karena RUU perubahan Pilpres ini diusulkan oleh Baleg, maka penarikan juga dilakukan oleh Baleg. Terhadap laporan ini, banyak anggota Dewan mengajukan interupsi terhadap penarikan RUU Pilpres. Rapat Paripurna memutuskan bahwa keputusan Baleg untuk tidak melanjutkan/menghentikan penyusunan RUU Pilpres, akan dibawa kembali pada Rapat Paripurna tanggal 24 Oktober.

Adapun penarikan RUU tentang PPDT yang sudah memasuki Pembicaraan Tingkat I, bahkan sudah mengalami 7 kali masa sidang, Baleg dan Pemerintah menyetujui untuk tidak dilanjutkan pembahasannya. Itu dilakukan pada rapat Baleg dengan Menteri PDT-RI pada 10 Oktober 2013. Kepu-



tusan mengenai penarikan RUU ini dari Prolegnas 2013, juga masih akan dilakukan pada Rapat Paripurna 24 Oktober.

Apabila penarikan kedua RUU ini disetujui, maka Prolegnas 2013 mengalami perubahan, dari semula berjumlah 75 RUU dan 5 RUU Kumulatif Terbuka, menjadi 73 RUU dan 5 RUU Kumulatif Terbuka.

Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi yang dilakukan AKD antara lain laporan Komisi VIII mengenai: [1] pembahasan RUU tentang Jaminan Produk Halal. RUU ini masih terus dibahas antara Komisi VIII dengan Pemerintah, karena masih banyak pasal yang menemui krusial. Oleh karenanya, pembahasannya masih akan dilanjutkan pada masa sidang yang akan datang. [2] RUU tentang perubahan atas UU No. 38 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. RUU ini masih dalam tahap proses pengharmonisan dengan Baleg DPR. [3] RUU tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender, masih dalam proses penyusunan dan perumusan oleh panja Komisi VIII.

Komisi IV melakukan rapat penyusunan/perumusan: [1] RUU tentang perubahan UU No 18 tahun 2004 tentang Perkebunan. RUU ini masih terus dibahas oleh Komisi IV melalui RDP maupun RDPU untuk menerima masukan. [2] RUU tentang Konservasi Tanah dan Air, pembahasannya masih dilakukan melalui RDP dan RDPU untuk menerima masukan. Tujuan UU ini dibentuk untuk mewujudkan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan menjamin lahan yang mampu mendukung kehidupan masyarakat, mengoptimalkan aneka fungsi lahan untuk mencapai manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan secara seimbang dan lestari, meningkatkan daya dukung DAS, serta menjamin distribusi manfaat secara merata. Konservasi tanah dan air merupakan upaya penempatan setiap bidang lahan pada penggunaan yang sesuai dengan kemampuan lahan tersebut, dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah sehingga dapat mendukung kehidupan secara lestari.

[3] RUU tentang perubahan atas UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Masih dalam taraf menerima masukan dan juga akan dilakukan Kunker ke beberapa Perguruan Tinggi untuk melakukan jaring pendapat atas pembahasan RUU tersebut.

Penyusunan RUU oleh Komisi II: [1] RUU tentang Aparatur Sipil Negara, sesuai dengan keputusan Rapat Intern Komisi II DPR RI tanggal 21 Agustus 2013, disepakati terhadap RUU tentang Aparatur Sipil Negara akan diupayakan penyelesaiannya pada Masa Persidangan I 2013-2014. Namun, RUU ini masih memerlukan perpanjangan waktu pembahasan, dengan isu krusial Jabatan Eksekutif Senior, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Organisasi ASN, dan Penggajian dan Pensiunan Pegawai ASN. [2] RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah, masih memerlukan perpanjangan waktu pembahasan dengan isu krusial yaitu mekanisme pemilihan (khususnya fokus pemilihan gubernur); tidak satu paket

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; syarat kepala daerah (ikatan perkawinan); tugas, wewenang, dan syarat calon wakil kepala daerah; penyelesaian sengketa; penyelenggaraan pilkada: Dana pilkada/peran pemerintah daerah, Pilkada serentak, dan lain-lain (pasal lain yang tidak masuk cluster); dan dana penyelenggaraan Pilkada. [3] RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB), sampai dengan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2013-2014 dari 19 RUU DOB yang ada, masih terdapat 4 RUU DOB yang belum disahkan menjadi undang-undang yaitu: RUU tentang Pembentukan Kab. Buton Tengah, RUU tentang Pembentukan Kab. Buton Selatan, RUU tentang Pembentukan Kab. Muna Barat, dan RUU tentang Pembentukan Kota Raha. Sesuai dengan keputusan Rapat Intern Komisi II DPR RI tanggal 21 Agustus 2013, disepakati terhadap RUU DOB akan diupayakan penyelesaiannya pada Masa Persidangan II yang akan datang. [4] RUU Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Sesuai dengan Keputusan Rapat Bamus DPR RI tanggal 27 Mei 2013 dan Surat Pimpinan DPR RI Nomor SP.07/05890/DPR RI/V/2013 tanggal 29 Mei 2013, memutuskan/menyetujui Penanganan RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dilaksanakan oleh Komisi II DPR RI.

Fungsi Anggaran

Laporan Badan Anggaran telah disampaikan pada Rapat Paripurna pada agenda yang pertama 25 Oktober 2013. DPR memberikan persetujuan RUU APBN TA 2014 untuk disahkan menjadi UU. Adapun hasil kesepakatan dengan Pemerintah yang perlu kita catat adalah: pertumbuhan ekonomi (PDB) disepakati sebesar 6,0% dari semula 6,4% yang diajukan pemerintah; target inflasi 5,5% dari semula 4,5%; tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara 3 bulan 5,5%; nilai tukar rupiah terhadap dolar AS disepakati Rp. 10.500 dari semula Rp. 9.750 per dolar AS; *lifting* minyak bumi ditargetkan sebesar 870.000 barel per hari; *lifting* gas bumi ditargetkan sebesar 1.240.000 barel setara minyak per hari; serta harga minyak mentah Indonesia disepakati sebesar 105 dolar AS per barel dari rencana semula sebesar 106 dolar AS per barel.

Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,0% tahun 2014 mendatang, harus berkualitas, inklusif, terukur dan berkeadilan sehingga dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia melalui pembukaan lapangan kerja baru dan penurunan tingkat kemiskinan. Program pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh Pemerintah dari tahun 2009-2013 telah menghabiskan anggaran negara yang cukup besar, tetapi masih terdapat sejumlah masyarakat miskin, dan rentan miskin di berbagai daerah. Untuk itu diperlukan pendekatan baru dalam penanggulangan kemiskinan melalui program strategis dan jangka panjang di luar program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Program yang diharapkan dapat membangun masyarakat sehingga mampu survive secara berkelanjutan.

Di sisi pendapatan, sektor yang memberikan kontribusi besar adalah perpajakan, namun masih banyak permasalahan

an terkait dengan prosentase *tax ratio* yang sulit tumbuh, meskipun pemerintah telah berupaya melalui perbaikan sistem pemungutan pajak dan pemanfaatan terhadap potensi pajak yang belum optimal. Dalam RAPBN 2014 *tax ratio* disepakati 12,34%, hal ini berarti lebih rendah dari yang diusulkan pemerintah sebesar 12,64%. Pemerintah masih harus terus mendorong prosentase pendapatan dari wajib pajak potensial, agar terus menaikkan jumlah dan sarannya melalui metode yang tepat.

Diplomasi Parlemen

Di bidang internasional, Dewan terus berupaya untuk meningkatkan kerjasama antar-parlemen di berbagai kawasan dengan negara-negara sahabat. Kita telah mengikuti Sidang Umum AIPA ke-34 di Brunei Darussalam dengan pokok bahasan “*The Role of AIPA in Realising the ASEAN Community*”. DPR-RI berpartisipasi penuh dalam Sidang Umum tersebut dengan mengusulkan dua tema tambahan di bidang ekonomi yang kemudian disetujui menjadi resolusi AIPA dengan judul “*The Role of AIPA in response to the*

Challenges of ASEAN Economic Community”. Sedangkan usul Indonesia mengenai “*The Role of AIPA in the Promotion of Human Rights in Business Sectors*” masih akan dibahas pada Sidang Umum AIPA tahun depan di Laos. DPR juga mengusulkan tambahan tema di bidang sosial mengenai “*Post 2015 Development Agenda: AIPA’s Commitment in Countering the Rising Challenges*” yang diterima oleh seluruh peserta Sidang Umum AIPA di bidang sosial.

Masih dalam upaya meningkatkan kerja sama internasional di kawasan, para anggota parlemen di kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam *the Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC)* pada tanggal 23-24 Oktober 2013 telah mengadakan Sidang Umum SEAPAC, yang bertemakan “*Corrupt-free Southeast Asia : Common Goal, Common Action*”. Sidang ini dihadiri oleh perwakilan parlemen dari negara-negara ASEAN, para observer dari berbagai negara sahabat untuk mengukuhkan semangat dan gerakan anti-korupsi di lingkup parlemen pada tingkat kawasan Asia Tenggara. Pertemuan ini menghasilkan *Median Declaration*, yang memuat komitmen dan upaya pemberantasan korupsi di kawasan Asia Tenggara.*

SEAPAC Hasilkan Empat Isu Utama Deklarasi Medan

Sidang Umum Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC) menghasilkan empat isu utama Deklarasi Medan diantaranya berkaitan dengan patronase politik dan dampaknya terhadap korupsi, Gender, budaya dan korupsi, mobilisasi massa dan memperbaiki kepercayaan publik.

Beberapa isi deklarasi diantaranya menyatakan tidak ada kekebalan hukum dalam bentuk apapun yang dapat diberikan kepada seseorang termasuk pejabat publik yang terlibat dalam kasus korupsi. Kemudian diperlukan kerjasama yang lebih erat antar berbagai pihak termasuk NGO, Media, sektor swasta dan institusi yang berkaitan dengan pengawasan korupsi.

Isu penting lainnya yaitu anggota parlemen harus berpartisipasi dalam



Ketua DPR RI Marzuki Alie dan Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung dan Sohibil Iman menghadiri Sidang SEAPAC II di Medan.

mempromosikan prinsip-prinsip UNCAC (*United Nations Convention on Anti-Corruption*) yang terdiri dari upaya pencegahan, kriminalisasi, pengembalian aset, kerjasama internasional dan mekanisme pengawasan yang efektif.

“Sebagai tuan rumah Indonesia khususnya DPR RI sebagai penyelenggara

sidang umum SEAPAC, memiliki kepentingan yang begitu besar terhadap kerjasama regional dalam pemberantasan korupsi,” ujar Wakil Ketua DPR Pramono Anung saat konferensi Pers SEAPAC, di Medan, Kamis, (24/10).

Menurutnya, korupsi bukan lagi isu domestik tetapi sudah dikategorikan sebagai kejahatan lintas batas negara,

sebagaimana juga diakui oleh UNCAC bahwa korupsi merupakan ancaman trans nasional. “DPR RI berusaha untuk mengambil inisiatif dan mendorong langkah konkret demi mewujudkan kerjasama antar negara dalam pemberantasan korupsi,” tandasnya.

SEAPAC didirikan sejak tahun 2005 di Manila, Filipina, sebagai *regional chapter* GOPAC (*Global Organization of Parliamentarians Against Corruption*) yang bermarkas di Kanada. Sebanyak 28 orang anggota DPR RI bergabung menjadi anggota SEAPAC melalui pem-

entukan gugus tugas nasional anti korupsi pada Desember 2012. Saat ini jumlah anggota DPR yang bergabung dengan SEAPAC sudah mencapai 39 orang. (si).

Ketua BKSAP Usulkan Kode Etik Anti Korupsi DPR

Terkait hasil deklarasi Medan, Ketua BKSAP Surahman Hidayat mengusulkan agar segera disusun Kode etik khusus anti korupsi bagi anggota Dewan. “Memang kita sudah ada *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) namun itu masih normatif kita ingin yang lebih aplikatif lagi untuk memerangi korupsi di DPR RI,” ujarnya disela-sela Sidang umum *Southeast Asian Parliamentarians against Corruption* (SEAPAC) di Medan, Kamis, (24/10).

Menurutnya, ini merupakan upaya kita untuk berbuat sesuatu dalam memberantas korupsi dan termasuk etika moral kita sebagai anggota DPR untuk memerangi praktek korupsi tersebut. “Kode etik itu untuk memelihara legitimasi anggota parlemen karena didalam dirinya melekat tanggung jawab sosial dan moral,” ujarnya.

Dia menambahkan, aturan internal DPR juga harus diperkuat terkait dukungan dalam memerangi praktek korupsi diantaranya menskors dan memecat anggota yang terlibat korupsi. “Kita juga akan mendorong sampai tingkat Fraksi dan yakin semangatnya sama semua,” tandasnya.

Surahman mengatakan, dirinya mendorong perbaikan UU MD3 sebagai pintu masuk dalam memerangi korupsi di Dewan. “khusus legislasi juga perlu diperbaiki dan itu menjadi pintu masuk untuk perbaikan kedepannya,” katanya.

SEAPAC menghasilkan empat isu utama Deklarasi Medan diantaranya berkaitan dengan patronase politik dan dampaknya terhadap korupsi, Gender, budaya dan korupsi, mobilisasi massa dan memperbaiki kepercayaan publik.

Beberapa isi deklarasi diantaranya menyatakan tidak ada kekebalan hukum dalam bentuk apapun yang dapat diberikan kepada seseorang termasuk pejabat publik yang terlibat dalam kasus korupsi. Kemudian diperlukan kerjasama yang lebih erat antar berbagai pihak termasuk NGO, Media, sektor swasta dan institusi yang berkaitan dengan pengawasan korupsi.

Isu penting lainnya yaitu anggota parlemen harus berpartisipasi dalam mempromosikan prinsip-prinsip UNCAC (*United Nations Convention on Anti-Corruption*) yang terdiri dari upaya pencegahan, kriminalisasi, pengembalian aset, kerjasama internasional dan mekanisme pengawasan yang efektif. (si)/foto;iwan armanias/parle



Ketua BKSAP Surahman Hidayat.

DPR RI Dorong Perluasan Gerakan Anti Korupsi di Asia Tenggara

Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengharapkan semakin meluasnya gerakan anti korupsi pada tingkat parlemen di Asia Tenggara. “Kita intinya mendorong semua anggota SEAPAC untuk memiliki *national chapter* karena memang yang baru memiliki *national chapter* adalah Indonesia, Malaysia dan Timor Leste,” ujar Ketua *Global Organization of Parliamentarians Against Corruption* (GOPAC) Indonesia ini saat konferensi Pers SEAPAC di Medan, Rabu, (23/10).



Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung.

Menurutnya, semua negara yang tergabung di SEAPAC memiliki pandangan yang sama bahwa keterbukaan itu menjadi faktor penting. Di sisi lain, diharapkan negara tetangga dapat bekerjasama untuk memulangkan para koruptor. “Jangan sampai para pelaku atau orang yang korupsi di Indonesia menjadikan negara tetangga sebagai surga bagi mereka,” tandasnya.

Pramono menambahkan, Deklarasi

Medan prinsipnya mengatur agar Parlemen di Asia Tenggara memiliki kesepahaman untuk segera meratifikasi *United Nation Convention against Corruption* (UNCAC). “Indonesia sendiri sudah hampir meratifikasi semua yang belum tinggal *asset recovery* saja,” katanya.

Dia mengatakan, ratifikasi *asset recovery* penting bagi Indonesia untuk mencegah para pelaku korupsi lintas batas melarikan uang hasil korupsinya. “Para pelaku korupsi makin lama makin canggih mereka tidak menempatkan uangnya di Indonesia atau negara sendiri tetapi dipindah ke luar

negari,” tandasnya.

Begitu dipindah ke luar negeri, lanjut Pram, Indonesia tidak memiliki alat untuk mengambil aset hasil korupsi tersebut. “Karena itu ratifikasi UNCAC itu sangat penting,” jelas Pramono. (si)/foto: iwan armanias/parle.

UU Peternakan dan Kesehatan Hewan Penopang Swasembada Daging



Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron berdialog dengan Menteri Pertanian dan jajarannya.

Komisi IV DPR RI bersama Pemerintah membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. “UU ini diharapkan menjadi salah satu penopang terhadap keinginan pemerintah untuk berswasembada daging, utamanya adalah daging sapi dan kerbau,” kata Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron.

Dalam Rapat Kerja Komisi IV yang dipimpin Herman Khaeron, dengan Menteri Pertanian Suswono, mensepakati bahwa terdapat 263 Daftar Inventaris Masalah (DIM), dengan Perubahan dan Usulan Baru sebanyak

136 DIM. Rabu (23/10), di Gedung DPR RI.

Herman menjelaskan RUU ini sebagai payung hukum agar sumber daya hewan pada subsektor peternakan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik berupa pangan, sandang, dan pakan. Pemanfaatan tersebut diatur agar mampu meningkatkan kesejahteraan peternak, menyerap banyak tenaga kerja, menggerakkan sektor ekonomi lainnya, dan mendukung kelestarian lingkungan.

Selain itu, pada tataran global eksistensi subsektor peternakan Indonesia

dilakukan melalui komitmen-komitmen internasional. “Memberikan dampak positif yang lebih besar, khususnya bagi pengembangan subsektor peternakan di dalam negeri,” tegasnya.

Patut diketahui, Mahkamah Konstitusi melalui Amar Putusan Nomor 137 Tahun 2009 dan Nomor 2 Tahun 2011 menyatakan beberapa substansi dalam Pasal 58 ayat (4), Pasal 59 ayat (2), Pasal 59 ayat (4), dan Pasal 68 ayat (4) dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal-pasal tersebut terkait dengan penerapan prinsip pengamanan maksimal terhadap pemasukan dan pengeluaran produk hewan, penguatan otoritas veteriner, serta pemberian sertifikasi halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan.

Terkait mengenai *Judicial Review*, supaya tidak membuang waktu, Menteri Pertanian Suswono setuju sejak awal untuk berkonsultasi dengan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, bersedia melibatkan Kementerian terkait dalam pembahasan RUU ini, seperti Kementerian Perdagangan. (as), foto: naefuroji/parle/hr.

Banggar dan Pemerintah Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2014

Rapat Badan Anggaran DPR dengan Pemerintah menyetujui asumsi makro ekonomi dalam Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2014. Persetujuan itu diantaranya terkait dengan pertumbuhan ekonomi, kurs

rupiah, hingga produksi minyak dan gas (migas).

Sebelum palu persetujuan RAPBN 2014 diketok, Banggar mengesahkan beberapa hasil rapat panitia kerja (Panja)



Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit dan Menteri Keuangan menandatangani asumsi makro ekonomi dalam RAPBN 2014.

menjadi kesimpulan rapat Panja. Hasil rapat panja yang disahkan diantaranya Panja Asumsi Dasar Pendapatan Defisit dan Pembiayaan, Laporan Panja Belanja Pemerintah Pusat, Laporan Panja Transfer Daerah, dan Laporan Panja Draft RUU.

“Laporan Panja kerja Asumsi Dasar Pendapatan Defisit dan Pembiayaan, Laporan Panja Belanja Pemerintah Pusat, Laporan Panja Transfer Daerah, dan Laporan Panja Draft RUU pada akhirnya bisa kita sepakati sebagai keputusan dan kesimpulan rapat kerja,” kata Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit ketika raker dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Gubernur BI, di ruang Rapat Banggar, Gedung Nusantara II, Rabu (23/10).

barel per hari dan *lifting* gas bumi sebesar 1.240 ribu barel setara minyak per hari.

“Inflasi sebesar 5,5% atau terjadi selisih 1% dari patokan pemerintah 4,5%. Sedangkan nilai tukar rupiah disepakati Rp 10.500 per dolar Amerika Serikat (AS) atau naik Rp 750 dari sebelumnya Rp 9.750. Tingkat Suku Bunga SPN 3 bulan tidak berubah atau tetap 5,5%,” jelas Politisi Golkar ini.

Dengan hasil kesepakatan antara Banggar DPR dan pemerintah ini akan dibawa ke Pembicaraan Tingkat II pada Rapat Paripurna, Jumat (25/10), untuk kemudian disetujui menjadi UU APBN 2014. (sf) Foto: wahyu/parle.

DPR RI Dukung Ratifikasi Asset Recovery

DPR mendukung ratifikasi Internasional terkait pemulangan (*asset recovery*) menjadi Undang-Undang. “Kalau di Indonesia untuk *asset recovery* harapannya periode ini sudah dapat dimasukkan karena sejak 2008 masih berada di pemerintah,” ujar Wakil Ketua DPR Pramono Anung disela-sela Sidang Umum the Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC), di Medan, Kamis, (24/10).

Menurutnya, Indonesia sudah memiliki lembaga KPK, Tipikor dan Otoritas Jasa Keuangan namun apabila belum punya UU terkait aset *recovery* maka

tentunya akan percuma juga kerja keras mengejar aset para koruptor. “Ini merupakan inisiatif pemerintah untuk meratifikasinya karena memang domainnya mereka,” tandasnya.

Terkait sanksi hukum pemiskinan bagi koruptor, lanjutnya, siapapun yang berbuat tindak pidana korupsi harus dihukum seberat-beratnya. “Saya mendukung adanya sanksi tegas bagi koruptor,” katanya.

Dia menambahkan, saat ini *trias politica* sudah tersentuh korupsi semua istilahnya menjadi *trias corruptica*. “Ini



Ketua Gugus Tugas Nasional Anti Korupsi DPR Pramono Anung.

berbahaya betul sampai Mahkamah Konstitusi sudah mulai terkena korupsi dan membahayakan kehidupan berbangsa,” ujarnya. (si)/foto: iwan armianas/parle.

Perempuan Harus dilibatkan dalam Pengambilan Kebijakan Politik

Seluruh parlemen Asean diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada kaum perempuan dalam berbagai aspek politik dan pengambilan kebijakan.

Pendapat itu disampaikan oleh Presiden Parlemen Perempuan sedunia (*Coordinating Committee of Women Parliamentarians*) periode 2012-2014 Nurhayati Ali Assegaf saat menyampaikan presentasinya dihadapan puluhan anggota Parlemen se-Asean, Rabu, di Medan, (23/10).

“Kita mengharapkan jangan sampai ada pembatasan dalam berbagai bidang bagi perempuan untuk menempati posisi sebagai pimpinan,” ujarnya dalam presentasinya tersebut.

Disisi lain, lanjutnya, perempuan juga harus dilibatkan dalam berbagai



Presiden Parlemen Perempuan sedunia Nurhayati Ali Assegaf.

pengambilan keputusan dan berbagai program pengentasan korupsi. “Korupsi saat ini menjadi isu hangat dalam berbagai aspek, pasalnya yang kerap terkena dampak dari korupsi

itu adalah perempuan, minoritas dan masyarakat banyak,” kata politisi dari Partai Demokrat ini.

Dia menegaskan, perlu dibangun akuntabilitas publik dan sistem pemerintahan yang mampu merespons seluruh aspirasi perempuan. “Parlemen juga memiliki peran yang kritis dalam memerangi korupsi dari sisi pembuatan UU dan penerapannya,” tambahnya.

Nurhayati mengatakan, perlu koordinasi dan kerjasama antara parlemen dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi. “Perlu penggalangan partisipasi dari masyarakat madani guna mencapai kepedulian masyarakat yang tinggi terhadap penyelenggaraan negara yang akuntabel dan transparan,” tandasnya. (si) Foto:wy/parle

Pansus DPR Tolak RUU PPK Diintegrasikan Dalam RUU Pemda



Wakil Ketua Pansus RUU PPK Alex Litaay menerima Pandangan F-Gerindra Fary Djemi Fransis.

Rapat Panitia Khusus (Pansus) RUU Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan (PPDK) yang dipimpin Ketuaanya Abdul Gafar Patappe dengan Mendagri Gamawan Fauzi dan wakil-wakil dari Menkumham, Menlu dan Bappenas Rabu (23/10) di Gedung

DPR, secara tegas menolak diintegrasikannya RUU PPK kedalam RUU Pemda. Seluruh fraksi di Pansus minus Fraksi PP yang berhalangan hadir tetap berharap, RUU PPK yang merupakan usul inisiatif DPR, dibahas tersendiri.

Fraksi-fraksi DPR mengharapkan agar pemerintah segera menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk membahas RUU dan diharapkan dalam masa persidangan mendatang atau pada bulan Nopember-Desember, bisa diselesaikan.

Sikap yang sama juga disampaikan Wakil dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang hadir dan terlibat pembahasan RUU PPK agar RUU segera disahkan. Ia menyatakan, daerah-daerah sudah berkali-kali menagih kapan RUU PPK bisa diselesaikan setiap kali mengadakan kunjungan kerja ke daerah pemilihannya.

Fraksi-fraksi DPR juga menyatakan, apabila RUU PPK diintegrasikan ke dalam RUU Pemda, maka semangat untuk mempercepat pembangunan daerah kepulauan akan kehilangan ruh. Masyarakat di daerah kepulauan masih tertinggal, masih miskin dan

terbelakang sehingga perlu ada terobosan dengan melahirkan UU PPDK. “Dengan kondisi keterbelakangan itu maka daerah kepulauan tidak mantap dan rawan terhadap gangguan kamtibmas serta merugikan NKRI,” kata jubir FPDJ Perjuangan Tri Tamtomo.

Sikap fraksi PD yang disampaikan Anang Samudra, Bobby A. Rizaldi dari FPG, Sigit Sosiantomo dari FPKS, Muhammad Toha dari FPKB, Rahman Halid dari Fraksi Hanura, Muhamad

Syafrudin dari Fraksi PAN dan Fary Djemi Fransis dari Fraksi Gerindra juga sependapat, agar pembahasan RUU PPDK bisa dipercepat.

Mereka sepakat perlunya RUU PPDK karena Indonesia terdiri wilayah kepulauan yang sangat banyak baik pulau besar maupun kecil, sehingga negara dituntut untuk memberikan perhatian yang besar dengan prinsip keadilan dan pemerataan. Dengan demikian, tidak ada satupun wilayah di dalam

NKRI ini yang merasa dianaktirikan. Selama ini banyak wilayah di tanah akhir termasuk daerah kepulauan tidak mendapat perhatian yang memadai. Bahkan banyak pulau-pulau yang belum diberi nama.

“ Karena itu perlu pengaturan khusus terhadap daerah kepulauan yang tujuannya adalah mengakselerasi kemajuan daerah-daerah kepulauan,” ungkap M Syafrudin menambahkan. (mp), foto : naefuroji/parle/hr.

DPR RI Dorong Bahas Kembali Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura

Ketua DPR Marzuki Alie mendorong kembali pembahasan ekstradisi Indonesia-Singapura yang masih belum selesai hingga saat ini.

“Mereka menanggapi dengan serius pembicaraan ekstradisi ini, dan kita harus segera kembali membicarakannya,” ujar Presiden SEAPAC, usai membuka Sidang Umum *the Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption* (SEAPAC) di Medan, Rabu (23/10).

Dia menambahkan, pada dasarnya Singapura mulai membuka diri terhadap keinginan Indonesia untuk memulangkan koruptor yang lari. Termasuk, tambah Marzuki, mengenai klausul tindak pidana pencucian uang (TPPU) di mana Singapura



Ketua DPR RI Marzuki Alie.

diduga menjadi tempat penyimpanan uang korupsi para koruptor Indonesia.

“Namun untuk beberapa klausul perlu diverifikasi terutama masalah pencucian uang. Di Singapura kan uang dari judi tidak soal. Ini yang agak berbeda,” ungkapnya.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia dan Singapura sempat menandatangani perjanjian ekstradisi pemulangan para koruptor, namun ditolak DPR karena digabung dengan klausul perjanjian pertahanan. “DPR lalu menolak usulan itu, seharusnya dipisah dengan kerjasama militer, karena memang substansinya beda,” tandasnya. (si), foto : sugeng/parle/hr.

Penetapan Komjen Sutarman Sebagai Kapolri Dibumbui Interupsi

Rapat Paripurna DPR RI akhirnya menerima laporan Komisi III mengenai pelaksanaan *fit and proper test* dan menetapkan Komjen Sutarman sebagai calon Kapolri terpilih. Seluruh peserta rapat menyatakan persetujuan secara bulat.

“Apakah laporan Komisi III disetujui untuk ditetapkan?” tanya Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua DPR yang memimpin jalannya sidang di Ruang Paripurna, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/13). Pertanyaan ini disambut koor setuju oleh peserta rapat.



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso dan Kapolri Sutarman.

Proses selanjutnya pimpinan sidang mempersilahkan Komjen. Pol. Sutarman untuk maju ke depan meja pimpinan untuk diperkenalkan kepada anggota DPR yang hadir. Ia se-

cara khusus memberikan penghormatan kepada Priyo dan seluruh anggota dewan.

Ketika Kapolri terpilih akan meninggalkan ruang sidang, tiba-tiba terdengar seruan interupsi dari Rieke Diah Pitaloka anggota Komisi IX dari FPDIP. Lewat pimpinan sidang ia meminta Kapolri tetap tinggal di tempat dan menggunakan kesempatan itu meminta kepolisian tidak menggunakan kekerasan dalam menangani unjuk rasa para buruh.

Anggota Komisi III dari FPG Nudirman Munir juga ikut mengacungkan tangan. “Blackberry yang sudah beroperasi sejak tahun 2006 di Republik Indonesia tidak membayar pajak sepeserpun kepada negeri tercinta ini. Kapolri baru yang berencana membentuk Densus Anti Korupsi untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan karena ada pembiaran dalam kasus ini,” tandasnya.

Sementara itu anggota Komisi II dari FPD GRAY Koes-

moertiyah mempertanyakan aksi premanisme yang menimpanya. “Kasus saya sudah berlangsung sejak tahun 2005 tidak juga diselesaikan. Saya dikejar-kejar oleh preman yang membawa pedang dan clurit, kita mau dibunuh tapi tidak ditindak. Kapolri perlu melihat anak buahnya kebawah kenapa terjadi ketidakadilan seperti ini,” paparnya.

Ada 5 anggota DPR lain yang juga melakukan interupsi dalam rapat tersebut. Priyo yang memimpin jalan sidang menekankan interupsi tersebut tidak mengurangi derajat sah penetapan Kapolri yang baru saja dilakukan.

“Kalau kesempatan ini saya buka akan sangat banyak sekali interupsi karena Kapolri sangat sentral dalam pengamanan masyarakat. Ketukan palu saya tadi berarti Komjen Sutarnan sudah sah menjadi Kapolri sesuai hukum tata negara, tinggal presiden melantik secara formal,” demikian Priyo. (iky)/foto:wy/parle/hr.

Ketua DPR Buka Sidang Umum SEAPAC II di Medan

Presiden *the Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC)* Marzuki Alie secara resmi membuka Sidang Umum *the Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC)* ke-2 di Hotel Aryaduta, Medan Rabu (23/10).

Dalam sambutannya, Ketua DPR mengatakan, pertemuan kali ini bertujuan untuk meningkatkan upaya bersama guna memperkuat komitmen dan langkah strategis kita demi penciptaan kawasan Asia Tenggara yang bebas dari korupsi, di antaranya melalui pencapaian pemerintahan yang baik dan pembangunan rezim anti-korupsi yang kokoh di kawasan Asia Tenggara.

“Terlebih, dalam konteks organisasi ASEAN, saat ini tengah bergeser menuju agenda besarnya, yakni pembentukan Komunitas ASEAN 2015,”ujarnya.

Di samping itu, lanjutnya, dirinya juga mengakui adanya peran penting yang dimiliki dan dapat dimainkan oleh kaum perempuan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk dalam keberadaan kaum perempuan di posisi politik dan sektor publik yang strategis, serta pada jaringan konstituennya.



Presiden SEAPAC Marzuki Alie memukul gong tanda pembukaan Sidang Umum II SEAPAC Medan.

“Saat ini peran kaum perempuan terus meningkat seiring semakin banyaknya kaum perempuan yang terlibat dalam kegiatan politik di masa sekarang,”katanya.

Sebagaimana ditekankan dalam Deklarasi Brasilia melalui *the 15th edition of the biennial International Anti-Corruption Conference (IACC)* pada bulan November 2012 yang lalu, Marzuki memandang perlu untuk membangun jaringan agen-agen perubahan, *connecting agents of change*, yang terdiri

atas para individu yang berintegritas, berani dan memiliki kemampuan keilmuan, guna mendukung penegakan dan pengembangan transparansi serta akuntabilitas kegiatan pemerintahan di setiap tingkatan.

“Tidak mungkin ada hasil yang efektif, jika individu-individu yang berperan dalam pembangunan di berbagai tingkatan di masyarakat adalah mereka yang bermental rusak dan koruptif,” ujarnya. (si), foto: sugeng/parle/hr.



Korupsi Masih Jadi Masalah Serius di Asia Tenggara



Presiden SEAPAC Marzuki Alie.

Presiden *the Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption* (SEAPAC) Marzuki Alie menyadari bahwa persoalan Korupsi di kawasan Asia Tenggara masih tergolong serius. “Dalam indeks persepsi Korupsi (IPK) dari organisasi Transparency International (TI) kita menyaksikan bahwa skor nilai yang diraih pada tahun 2012 yang lalu masih tinggi,” ujarnya saat menyampaikan pidato pembukaan Sidang Umum SEAPAC, Rabu, (23/10) di Medan.

Menurutnya, hal ini merupakan tantangan besar, utamanya bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang berada pada level bawah dari peringkat bebas korupsi. “Untuk itu, kita tentunya terbuka untuk saling bertukar pengalaman, pengetahuan, dan “*best practices*” dari negara-negara sahabat di kawasan Asia Tenggara yang telah mencapai kesuksesan dalam pemberantasan korupsi,” katanya.

Dia menambahkan, kita sepenuhnya memahami bahwa tindak pidana korupsi merupakan jenis kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*) yang akan memunculkan beragam dampak buruk bagi masyarakat kita dan di kawasan.

“Korupsi menghambat efektifitas mobilisasi dan alokasi sumber daya pembangunan bagi pengentasan kemiskinan dan kelaparan, serta juga menghambat pencapaian pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable*

development),” tandasnya.

Pimpinan DPR ini mengajak semua pihak untuk menjadikan isu korupsi tidak populer dan tidak relevan lagi di kawasan, dengan harapan kita berhasil dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di negara kita masing-masing.

Untuk itu, kita mesti membangun kerjasama yang efektif, terlebih dengan kedekatan geografis dan kemiripan sosial-budaya yang kita miliki turut memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kerjasama pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Asia Tenggara.

“Isu korupsi di kawasan Asia Tenggara masih merupakan tantangan besar dan ironis bagi kehidupan masyarakat kita saat ini,” katanya. (si), foto : sugeng/parle/hr.

ATBI 2014 Akan Dibahas di Dua Panja

Komisi XI belum dapat memutuskan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) tahun 2014. Untuk Evaluasi Pelaksanaan ATBI Operasional Tahun 2013 dan Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Operasional Tahun 2014, Komisi XI dan Gubernur BI sepakat akan melakukan pembahasan lebih lanjut dalam rapat Panja SDM dan Penerimaan ATBI Tahun 2014 dan Panja Logistik, Pendukung, dan lainnya ATBI 2014.

Anggota Komisi XI Kamaruddin Sjam menyatakan kedua panja ini akan membahas soal ATBI 2014 secara lebih rinci. Termasuk soal klasifikasi penganggaran mana yang masuk anggaran operasional maupun anggaran kebijakan yang banyak dipertanyakan Anggota Komisi XI.

“Saya minta klasifikasi tentang anggaran operasional dan kebijakan harus *clear* dulu. Misalnya membeli mesin pencetak uang, itu masuk kebijakan



Anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait.

atau operasional,” ujar Politisi Golkar ini saat Raker antara Komisi X dengan Gubernur BI Agus Martowardojo di Gedung Nusantara I, Senin (21/10).

Selain itu, Anggota Komisi XI Maruarar Sirait juga mengkritisi soal belum dimasukkannya gaji pegawai BI yang akan pindah ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana itu sudah masuk ke dalam ATBI 2014. Pasalnya, berdasarkan UU OJK, pegawai BI yang ditugaskan di OJK ma-

sih akan digaji BI selama dua tahun.

“Saya tidak tahu kita sama atau masih berbeda soal masalah ini. Tapi saya menangkap, pandangan BI belum jelas soal anggaran BI untuk meng-cover pegawai BI di OJK nanti,” imbuh politisi PDI Perjuangan ini.

Dalam kesimpulan, Ketua Komisi XI Oilly Dondokambey menyatakan bahwa Gubernur BI perlu melakukan koordinasi dengan Ketua Dewan Komisiner OJK dan Menteri Keuangan terkait dengan pengalihan tugas dan fungsi dari BI kepada OJK.

“Apabila dalam RATBI 2014 belum dianggarkan, Komisi XI meminta kepada Gubernur BI untuk melakukan koordinasi dengan Ketua Dewan Komisiner OJK dan pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan, dan selanjutnya dilaporkan kembali kepada Komisi XI untuk mendapatkan persetujuan,” jelas Oilly. (sf) foto : ojie/parle.

DPR Minta KPU Tinjau Ulang Kerjasama Dengan Lemsaneg

DPR akhirnya memutuskan sikapnya terkait kerja sama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dalam penyelenggaraan pemilihan umum 2014.

Keputusan itu diambil dalam rapat gabungan antara Komisi I dan Komisi II DPR, serta KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Lemsaneg, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (24/10) yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso.

Priyo Budi Santoso mengatakan, hasil rapat memutuskan bahwa DPR memberi kewenangan pada KPU untuk meninjau ulang kerja sama dengan Lemsaneg. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang dan KPU diperbolehkan menggaet pihak lain dengan pengawasan tim audit agar penyelenggaraan pemilu berlangsung dengan baik dan tidak menimbulkan kecurigaan.

“Kesimpulannya adalah memberi kewenangan pada KPU untuk dapat meninjau ulang kerja sama dengan Lemsaneg dan mempersilakan KPU menjalin kerjasama dengan konsorsium, atau apa pun namanya, dengan ahli-ahli IT, termasuk jika perlu melibatkan ahli-ahli di Lemsaneg,” jelas Priyo.

Terkait keputusan itu, Ketua KPU Husni Kamil Malik menerima masukan dari DPR. Ia siap memperbaiki beberapa bagian dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) yang dibuat dengan

Lemsaneg agar penyelenggaraan pemilu berjalan lebih baik. “KPU diminta memastikan keterlibatan yang lebih luas dari masyarakat dan pakar lainnya. Rapat ini mencatat Lemsaneg punya kompetensi dan data pemilu,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Kepala Lemsaneg Mayjen TNI Djoko Setiadi legowo dengan semua keputusan rapat. Meski demikian, Djoko menyatakan pihaknya siap memberikan bantuan bila diminta ikut dalam mengamankan data pemilu. “Jika Lemsaneg dijadikan kambing hitam, maka kami setuju (untuk tidak bekerja sama-red). Tapi jika dibutuhkan, kapan pun kami siap,” ujarnya.

Seperti diketahui, KPU meminta bantuan Lemsaneg untuk menjaga penyampaian hasil pemungutan suara Pemilu 2014. Selain dengan pengamanan sistem informasi dan teknologi milik KPU, Lemsaneg juga menerjunkan anggotanya di beberapa daerah. Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, alasan menggandeng Lemsaneg dalam mengamankan data Pemilu 2014 adalah karena KPU kekurangan sumber daya manusia dan infrastruktur terkait teknologi informasi.

Dia mengatakan, pada 2012 lalu, KPU disarankan bekerja sama dengan beberapa instansi negara untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu 2014. Selain dengan Lemsaneg, KPU juga menggandeng Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Kerja



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso.

sama ini dinilai membantu meningkatkan kemampuan teknologi informasi kepemiluan.

Bakal ditinjau ulang kerja sama antara KPU dengan Lemsaneg sudah diprediksi oleh Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa. Politisi dari Partai Golkar itu mengatakan kerjasama antara KPU dengan Lemsaneg akan ditolak sembilan fraksi di DPR.

“Kerja sama KPU-Lemsaneg cenderung akan ditolak. Kayaknya sembilan fraksi akan nolak, karena aspirasi masyarakat itu kebanyakan tidak percaya dengan Lemsaneg dalam Pemilu,” terangnya.

Terakhir kata dia, Komisi II DPR tak mempersoalkan KPU bekerja sama dengan pihak manapun untuk mengamankan data pemilu, namun bukan dengan Lemsaneg. “Yang kita terima itu sistem pengawasan dan pengamanannya bukan dengan Lemsaneg, tapi merekrut ahli dan stakeholder lain untuk mengawasi dan mengamankan,” tuntasnya. (nt) foto : *iwana armanias/parle*.

Komisi VIII Harapkan BNPB Sediakan Kapal Rumah Sakit Antar Pulau

Anggota Komisi VIII DPR RI, M Baghowi dalam rapat kerja dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa (22/10) mengharapkan BNPB membuat Rumah Sakit atau Puskesmas terapung berbentuk kapal. Rukit tersebut nantinya dapat digu-

nakan untuk menangani korban saat terjadi bencana alam.

“Indonesia negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil. Khusus untuk pulau kecil saat terjadi bencana alam, sangat sulit untuk

menangani korban. Lokasinya yang sangat terpencil, belum lagi peralatan medis yang tidak memadai. Sementara jika harus membawa korban ke pulau lain yang lebih besar dan peralatan medisnya lebih memadai, kapal yang tersedia hanya mampu menampung

5-8 orang saja. Oleh karena itu saya mengharapkan agar BNPB dapat menyediakan rumah sakit atau puskesmas yang berbentuk kapal,” kata Baghowi.

Dengan adanya kapal puskesmas atau kapal rumah sakit itu, dilanjutkan politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini, tentu akan memudahkan penanganan korban bencana alam yang berada di pulau-pulau terpencil.

Sependapat dengan Baghowi, anggota Komisi VIII lainnya, Amran mengatakan bahwa saat ini kebutuhan akan rumah sakit *mobile* yang berbentuk kapal, dan bisa berpindah dari satu pulau ke pulau lain sangat mendesak.

Hal tersebut mengingat di bulan Oktober sudah memasuki musim peng-



Ketua Komisi VIII DPR Ida Fauziyah dan Anggota Komisi VIII berdialog dengan Ketua BNPB.

hujan yang notabene bagi masyarakat daerah pesisir tentu sangat rawan terhadap bencana. Amran berharap

perlu alokasi anggaran untuk tanggap darurat di pulau-pulau kecil. (Ayu), foto : wy/parle/hr.

Baleg Laporkan Penarikan Dua RUU Di Paripurna DPR RI

Penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (RUU Pilpres) tidak dilanjutkan atau dihentikan, dan draft RUU ditarik daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2013.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI (Baleg), Anna Muawanah saat membacakan Laporan Baleg tentang penarikan dua RUU dari Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2013 di Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (22/10)

Dilaporkan Anna, bahwa dua fraksi yaitu F-PPP dan F-Partai Hanura, tetap meminta untuk melanjutkan dan tidak ikut dalam pengambilan keputusan/*walk out*.

Sementara, lanjut Anna, dua fraksi yaitu F-PKS dan F-Partai Gerindra tidak menyetujui keputusan untuk menghentikan pembahasan penyusunan draft RUU Pilpres.

Sebagai pertimbangan dari kedua fraksi tersebut, bahwa Panja sudah bekerja selama kurang lebih 1,5 tahun yang tentunya juga mengeluarkan biaya/anggaran yang tidak sedikit. Dan Panja sendiri sudah melakukan pembahasan terhadap kurang lebih 262 pasal yang masih menyisakan 1 Pasal yang belum mendapat kesepakatan yaitu ketentuan mengenai *presidential threshold*. Kedua fraksi ini juga meminta, 1 pasal yang belum mendapatkan kesepakatan di Baleg hendaknya diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Sedangkan, lima fraksi lainnya (F-PD, F-PG, F-PDIP, F-PAN, dan F-PKB) menyatakan untuk tidak melanjutkan pembahasan penyusunan draft RUU Pilpres dengan per-



Wakil Ketua Baleg DPR Anna Muawanah berjabat tangan dengan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso.

timbangan, bahwa kekurangan atau kelemahan dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 yang bersifat teknis dapat diperbaiki melalui Peraturan KPU.

Selain itu, ketentuan dalam UU Nomor 42 Tahun 2008 masih memenuhi kebutuhan serta relevan untuk pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Disamping penarikan RUU Pilpres, Baleg juga melaporkan penarikan RUU tentang percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) dalam proses pembahasan pada Pembicaraan Tingkat I.

“Perlu kami sampaikan bahwa pembahasan RUU PPDT sudah dilakukan pada tahap pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) di tingkat Panitia Kerja,” kata Anna.

Namun, lanjut Anna, pembahasan RUU PPDT sempat terhenti untuk waktu cukup lama karena belum adanya kata sepakat terhadap satu substansi yaitu judul RUU. Dimana substansi tersebut akan mempengaruhi substansi lainnya dalam batang tubuh RUU.

“Dengan adanya penarikan dua RUU dari Prolegnas RUU

Prioritas Tahun 2013, bukan berarti beban legislasi tahun 2013 menjadi berkurang,” ujar Anna.

Menurutnya, apabila ada tekad bersama antara DPR dan pemerintah untuk menyelesaikan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2013, tentunya target Prolegnas yang disepakati bersama akan tercapai. (sc)/foto:wy/parle.

DPR Apresiasi Kenaikan Kunjungan Wisman



Anggota Komisi X Oelfah A. Syahrullah Harmanto.

Anggota Komisi X Oelfah A. Syahrullah Harmanto mengapresiasi kinerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atas keberhasilannya dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Namun, ia mengingatkan, semakin banyak kunjungan wisman, semakin menumpuk pula sampah yang ada di tempat-tempat wisata.

“Kita dapat melihat kenaikan jumlah kunjungan wisman yang dilakukan Kemenparekraf dalam waktu singkat. Namun, hanya mengingatkan, dengan meningkatnya wisman ini, semakin

banyak sampah pula yang ditinggalkan. Namun, kami minta program Indonesia Bersih yang dicanangkan Kemenparekraf agar tetap dipertahankan,” ujar Oelfah saat Raker dengan Menparekraf Mari Elka Pangestu di ruang rapat Komisi X, Gedung Nusantara I, Senin (21/10) malam.

Politisi Golkar ini mengingatkan pada musim tertentu, ada angin laut yang bisa membawa sampah-sampah masuk ke pantai Indonesia, dan ini sangat mempengaruhi kunjungan wisatawan. Sehingga, walaupun ia belum mengetahui berapa anggaran untuk program Indonesia Bersih, ia berharap program ini agar terus ditingkatkan.

Dalam paparan sebelumnya, Menparekraf menyatakan secara akumulatif dari Januari hingga Agustus 2013, kunjungan wisman sebanyak 5.643.271 kunjungan wisman. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 8,28% dibanding periode yang sama di tahun 2012, atau hanya sebanyak 5.211.704 kunjungan wisman.

Selain itu, Politisi asal Sulawesi Selatan ini juga mengapresiasi program PNPM Mandiri. Ia mengaku, program ini sangat dirasakan manfaatnya oleh

masyarakat. Namun, ia berharap pembagian anggaran program ini dapat terbagi rata.

“Kami ingin tetap mendesak supaya beberapa daerah yang menjadi destinasi pariwisata, supaya menjadi perhatian dalam membagi anggaran PNPM Mandiri. Untuk daerah potensial, ini harus kita bantu bersama,” tambah Oelfah.

Dalam raker ini yang dipimpin Ketua Komisi X Syamsul Bachri ini, Komisi X dan Menparekraf menyepakati pagu anggaran Kemenparekraf untuk tahun 2014 sebesar Rp 1,704 triliun. Rinciannya, Ditjen Pemasaran Alokasi mendapatkan alokasi sebesar Rp 474 miliar, Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata sebesar Rp 372 miliar.

Kemudian, Rp 242 miliar untuk Ditjen Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, Ditjen Ekonomi Kreatif berbasis MDI sebanyak Rp 112 miliar, dan Rp 315 miliar untuk Badan Pengembangan Sumber Daya Parekraf. Sementara itu, Sekretariat Jenderal mendapat alokasi sebesar 162 miliar. Sisanya, sebanyak Rp 24 miliar dialokasikan kepada Inspektorat Jenderal. (sf), foto : naefuroji/parle/hr.

Pimpinan DPR Titip Pesan Kepada Kapolri Baru

Suasana masih pagi, namun di depan ruang kerja Ketua DPR nampak berjejer beberapa polisi. Rupanya, Selasa (22/10) pagi itu dijadwalkan Ketua dan Wakil Ketua DPR menerima Kapolri yang baru, Komjen Pol Sutarmanto, pengganti Jenderal Timur Pradopo.

Komjen Pol Sutarmanto disambut oleh Ketua DPR Marzuki Alie dan Wakil Ketua DPR Pramono Anung di ruang kerjanya. Saat pertemuan berlangsung, kemudian menyusul ke dalam ruang pertemuan yakni Wakil Ketua DPR Sohibul Iman, Priyo Budi Santoso, dan Taufik Kurniawan. Pertemuan berlangsung secara tertutup.



Pimpinan DPR RI berfoto bersama Kapolri Komjen Sutarman.

Usai pertemuan, Marzuki menyatakan ada beberapa hal yang disampaikan kepada Komjen Pol Sutarman. Di antaranya terkait dengan bagaimana membangun soliditas organisasi, merangkul semua kepentingan yang ada di Kepolisian, termasuk efektifitas pekerjaan Kepolisian yang harus semakin lebih baik.

“Kita juga mengharapkan polisi itu merubah karakter menjadi pelayan. Tadi, Pak Iman (Sohibul Iman) juga mengatakan bahwa polisi di Jepang itu melayani dengan baik. Seperti bersaudara dengan masyarakat, dan bagaimana membangun karakter polisi itu menjadi pelayan masyarakat,” ujar Marzuki di Gedung Nusantara III, Lantai III, Komplek Parlemen, Senayan.

Pesan berikutnya, kata Marzuki mengutip pernyataan Pramono Anung, DPR yang mengharapkan Kepolisian dapat bersikap netral dan bersahabat dengan semuanya pada Pemilu 2014. Marzuki mewanti-wanti agar jangan sampai ada tindakan polisi yang ikut-ikutan bermain dalam Pemilu 2014 nanti.

“Kami juga meminta kepada Kapolri terkait penghargaan hak asasi manusia. Seperti Polisi Wanita yang ingin menggunakan penutup kepala atau jilbab. Bagaimana jilbab yang tidak mengganggu pekerjaannya sebagai Polisi. Tadi Kapolri menyatakan bahwa hal ini diberi kebebasan kepada masing-masing Polwan, karena ini merupakan hak asasi manusia,” tambah Politisi Demokrat ini.

Sedangkan, terkait dengan penanganan korupsi, Marzuki mengharapkan adanya sinergitas antara Kepolisian dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasalnya, polisi yang ada di KPK pembinaannya tetap berada di bawah Polri, sehingga diperlukan sinergitas dan langkah-langkah bersama dalam pemberantasan korupsi.

Menyinggung masalah permintaan kepada Kapolri untuk membentuk Densus Tipikor, Marzuki menilai hal ini dirasa belum perlu. Karena, masih ada lembaga atau badan yang menangani bidang ini.

“Sebaiknya Kepolisian membenahi apa yang terjadi di internal. Jangan terlalu banyak membuat lembaga atau badan. Kan juga sudah ada Tipikor, itu kan yang perlu ditingkatkan perannya. Lembaga yang sudah ada dioptimalkan, dibina, dan difungsikan terlebih dahulu. Mudah-mudahan ini akan membawa kebaikan bagi Indonesia,” harap Marzuki menutup wawancara. (sf), foto : wy/parle/hr.

Panja Flu Burung Pertanyakan Keterkaitan PT. Anugrah Nusantara

Anggota Panitia Kerja Flu Burung Komisi IX DPR RI, Imam Suroso mempertanyakan keterkaitan PT. Anugrah Nusantara dalam kasus Pengadaan Sarana dan Prasarana Pembuatan Vaksin Flu Burung untuk Manusia.

Hal tersebut, disampaikan Imam saat Rapat Dengar Pendapat Panja Flu Burung dengan Wakil Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri, dipimpin Ketua Panja, Nova Riyanti Yusuf membahas perkembangan pengusutan kasus Vaksin Flu Burung di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (21/10)

Pasalnya berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, PT. Anugrah Nusantara disinyalir dalam penggelembungan harga proyek vaksin flu burung se-



Anggota Panja Flu Burung Komisi IX DPR RI Imam Suroso.

sar Rp 350 M, sementara nilai proyek tersebut sebagaimana diketahui sebesar Rp 718,8 M.

“Apakah PT. Anugrah Nusantara sudah diperiksa, disidik, dan perkembangannya seperti apa, mohon dijelaskan,” kata politisi Fraksi PDI Perjuangan ini.

Dalam kesempatan tersebut, Imam juga mempertanyakan nasib peralatan-peralatan proyek vaksin flu burung yang menjadi barang sitaan polisi.

Menurut Imam, peralatan yang disita nantinya akan menjadi kadaluarsa. Padahal anggarannya mencapai Rp 1 T lebih. Dan mestinya proyek ini akan dilanjutkan, tapi karena proses penyidikan polisi belum jelas dan tidak selesai-selesai padahal sudah empat tahun.

“Mohon dijelaskan, dalam statemen di media kemarin Kabaraeskrim Sutarmanto menyatakan, ini akan segera kita selesaikan, saya jadi Kapolri pun ini jadi acuan karena ini tipikor. Jadi ini nanti segera diselesaikan,” papar Imam.

Imam minta Wakil Kepala Bareskrim menjelaskan sampai dimana perkembangannya dan kira-kira kapan selesai sampai B21.

Senada dengan Imam, Sri Rahayu, juga mempertanyakan apakah peralatan-peralatan yang menjadi sitaan polisi bisa dimanfaatkan selama penyidikan masih berjalan.

“Bolehkah peralatan-peralatan tersebut dimanfaatkan sebagaimana fungsi dari peralatan tersebut, karena jika tidak dimanfaatkan juga tidak ada gunanya, lama-lama juga jadi rusak menjadi barang rongsokan semua,” tanya Sri.

“Paling tidak seperti di Unair dan Bio Farma juga bisa dimanfaatkan, demikian juga di Kementerian mungkin karena alat yang belum dipasang barangkali dan bangunan mungkin tidak,” tambah Sri.

Menanggapi pertanyaan anggota Panja, Wakil Kepala Bareskrim Anas Yusuf menyatakan dirinya sepakat dengan Panja bahwa ini proyek yang mulia untuk kepentingan umat.

“Saya tidak menyampaikan atau melakukan suatu klarifikasi atau sebagai alasan-alasan, tapi memang proses perkembangan sekarang kita masih menunggu audit investigasi tentang wujud kerugian negara,” jelas Anas.

Menurut Anas untuk tersangka, kita tidak bisa menduga-duga tapi kemungkinan juga mungkin bisa saja hasil dari pada pengembangan penyidikan. Karena dalam proses pengadaan barang dan jasa ada pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran dan PPK.

“Tentunya akan kita potret bagaimana sebenarnya kasus ini secara komprehensif bahwa itu seperti apa. Dan diyakini tidak ada yang kita tutup-tutupi semua akan kita proses sesuai jalur hukum sepanjang perbuatan unsur melawan hukumnya terpenuhi,” papar Anas.

Mengeni apakah proyek ini bisa di-

lanjutkan atau tidak, kata Anas, sepanjang tidak terkait dengan proyek yang ada sekarang artinya akan sedikit banyak akan mempengaruhi daripada proyek yang sudah berjalan, tentunya ini akan ada kesulitan.

Sementara mengenai barang bukti apakah bisa dimanfaatkan, untuk sementara ini terkait dengan penyidikannya, kelanjutannya, belum bisa dimanfaatkan.

“Karena kalau memang sudah tidak dipakai, ini memang bisa digunakan, karena pertimbangan penyidik ini masih dipake, jadi belum bisa dibuka *police linenya*,” terang Anas.

“Kemudian apakah bisa dimanfaatkan, ini terkait dengan beberapa hal misalnya dimanfaatkan juga nanti akan merubah daripada fakta yang ada, apakah masih original daripada barang bukti atau akan dipakai akan ada nilai ekonomis, tentunya terus bagaimana pemakaian daripada uang itu semuanya itu ada aturannya, ini yang menjadi persoalan,” tambahnya.

(sc), foto : naefuroji/parle/hr.

Komisi VIII Kritisi Maktab Yang Tidak Memadai

Komisi VIII DPR mengkritisi adanya beberapa maktab (penginapan) jemaah haji di Mekah dengan fasilitas dan kondisi yang tidak memadai. Hal ini menurut Ketua Komisi VIII DPR RI, Ida Fauziah yang ikut melakukan pengawasan secara langsung ke Tanah Suci membuat beberapa jemaah haji kurang merasa nyaman.

“Ada beberapa Maktab atau penginapan yang kondisinya tidak memadai, misalnya airnya mati, kotor, bahkan ada yang toiletnya di luar dan lain-lain. Meski tidak seluruhnya demikian, namun hal itu tentu mengurangi kenyamanan jemaah haji dalam beribadah,” kritik Ida ketika dijumpai sesaat usai berlangsungnya Sidang Paripurna DPR, Selasa (21/10).

Saat itu juga Ida mendapat penjas-

an dari pihak penyelenggara ibadah haji, dalam hal ini Kementerian Agama, bahwa hal tersebut dikarenakan pemilihan pondokan dengan menggunakan teknik sampling. Misalnya, dari sepuluh pondokan atau maktab yang akan disewa penyelenggara haji, yang dilihat atau diperiksa kondisi dan fasilitasnya secara utuh hanya setengahnya saja. Setengah lainnya luput dari pemeriksaan.

“Pihak penyelenggara mengaku hanya memeriksa sebagian Maktab yang akan disewa, dan sebagian lagi tidak diperiksa karena disangkanya akan sama fasilitas dan kondisinya. Tetapi setelah ditempati jemaah haji kondisi beberapa Maktab malah bertolak belakang,” ungkap politisi dari Fraksi PKB ini.



Ketua Komisi VIII DPR Ida Fauziah.

Karena itu ke depan ia meminta Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama untuk tidak menggunakan teknik sampling atau contoh dalam melakukan pemeriksaan Maktab atau pondokan yang akan digunakan untuk calon jemaah haji tahun mendatang.

Meski demikian Ida mengaku belum bisa menyimpulkan apakah penyelenggaraan tahun ini lebih buruk atau lebih



baik dari tahun sebelumnya. Menurut Ida, masing-masing penyelenggaraan memiliki kelebihan dan kekurangan-

nya. Usai masa reses mendatang, para anggota Komisi VIII akan melakukan evaluasi bersama dengan Dirjen PHU,

Kementerian Agama terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. (Ayu) foto:ry/parle

Inalum Akan Menjadi Persero

PT. Indonesia Aluminium (Inalum) akan menjadi Persero, segera setelah perusahaan yang saat ini masih milik Nippon Asahan Aluminium (NAA) diserahkan kepada pemerintah Indonesia dari Jepang.

Hal tersebut terungkap dalam rapat Panja Inalum Komisi VI, Senin (21/10). Rapat menghadirkan Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu, Dirjen Kerjasama Industri Internasional Kemenperin, dan Deputi Manufaktur dan Industri Strategis KEMENBUMN. Rapat dipimpin Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto (F-PD) dan didampingi wakilnya Erik Satria Wardhana (F-Hanura).

Pihak pemerintah menjelaskan, PT. Inalum akan mendapat tambahan



Anggota Komisi VI DPR Ferarri Roemawi.

nama Persero, karena mayoritas sahamnya dikuasai pemerintah. Namun, Anggota Komisi VI Ferarri Roemawi sempat bertanya, apakah PT Inalum nantinya akan berada di bawah ke-

menterian BUMN? Dirjen KII malah menjawab, belum tentu. Ini jadi persoalan yang mengganjal, mengingat selama ini sudah ada UU yang mengatur BUMN. "Ini harus *clear* dulu," kata Ferarri singkat.

Sementara persoalan transisi lainnya yang ditanyakan Komisi VI di balik penyerahan Inalum pada 1 November ini adalah kontrak-kontrak kerja, penggunaan bahan baku, dan masalah karyawan. Pemerintah menjelaskan, kontrak kerja jangka panjang tidak dilakukan lagi oleh PT. Inalum. Penggunaan bahan baku diupayakan menggunakan produk dalam negeri 100%. Dan masalah karyawan tetap seperti apa adanya. Tidak ada tambahan dan pengurangan. (mh)/foto:odjie/parle/iw.

Seluruh Fraksi DPR Setuju Bahas RUU Panas Bumi

Seluruh fraksi di Panitia Khusus RUU Panas Bumi DPR menyatakan persetujuannya untuk membahas RUU tentang Panas Bumi yang disampaikan Menteri ESDM Jero Wacik dalam rapat kerja yang dipimpin Wakil Ketua Pansus Milton Pakpahan di Jakarta, Senin (21/10).

Persetujuan kesembilan Fraksi di Pansus RUU Panas Bumi (PB) disampaikan setelah Menteri ESDM menyampaikan paparannya mengenai latar belakang diajukannya RUU PB untuk menggantikan RUU No.27/2013 tentang Panas Bumi. Fraksi-fraksi DPR mendukung pernyataan pemerintah bahwa potensi panas bumi yang dimiliki sangat besar tetapi belum bisa dimanfaatkan secara optimal.

Fraksi-fraksi DPR menilai, setiap tahun selalu berdebat menyangkut anggaran untuk sektor energi termasuk alokasi subsidi, tetapi melupakan potensi energi panas bumi yang terkandung di perut bumi Indonesia. Karena itu mereka sepakat untuk melanjutkan pembahas RUU Panas Bumi yang disampaikan Menteri ESDM.

Sebelumnya Menteri ESDM menjelaskan betapa besar potensi energy panas bumi yang dimiliki Indonesia mencakup 46% kebutuhan dunia. Potensi panas bumi tersebar di seluruh Indonesia dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku atau di sekitar 49 lokasi.



Wakil Ketua Pansus RUU Panas Bumi Satya W. Yudha dan Milton Pakpahan berjabat tangan dengan Menteri ESDM Jero Wacik.

Ia membandingkan pemerintah sampai dengan tahun 2004 mengadakan energi listrik sebesar 26.000 MW, lalu 2004-2009 menambah menjadi 30.000 MW dan hingga tahun 2013 menambah lagi sebanyak 16 MW, sehingga berjumlah 46.000 MW. Dengan potensi energi panas bumi sebesar 28.000 MW maka bisa mencukupi untuk kebutuhan listrik bagi dua generasi.

"Kita harus memanfaatkan energi tersebut. Di balik banyaknya gunung berapi, kita juga dianugerahi sumber energi panas bumi yang sangat besar," demikian Menteri Jero Wacik. (mp), foto : wy/parle/hr.

Ukraina Serius Akan Masuk Bisnis Energi Dengan Indonesia

Wakil Ketua DPR Pramono Anung di ruang kerjanya Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (21/10) menerima kunjungan Ketua kelompok Persahabatan Parlemen Ukraina-Indonesia Volodymyr Vechenko, didampingi Dubes Ukraina untuk Indonesia Volodymyr Pakhil dan Dubes Indonesia untuk Ukraina Niniek Kun Naryatie.

Menurut Pramono, kunjungan Vechenko merupakan kunjungannya kedua kali ke Indonesia, membahas peningkatan hubungan kedua negara termasuk hubungan Parlemen Ukraina dan DPR-RI. Dalam pertemuan tersebut Ukraina menyatakan sangat serius untuk masuk ke peluang bisnis dengan Indonesia terutama berkaitan dengan energi yaitu batu bara, listrik dan tambang boksit.

Negara Eropa Timur tersebut, kata Pramono, dikenal cukup maju dalam bidang metalurgi karena itu mereka menawarkan kerja sama dengan Indonesia. Dia berharap tawaran tersebut bisa ditindaklanjuti dan direalisasikan di Indonesia sehingga akan membawa manfaat bagi kedua bangsa.

Kepada tamunya Pramono Anung yang menjabat Ketua Gugus Tugas Anti Korupsi DPR juga menjelaskan Anggota Parlemen Asia Tenggara (Seapac) akan menggelar Sidangnya di Medan 23-24 Oktober mendatang. Tema besarnya adalah bagaimana para anggota parlemen di kawasan Asean ini mempunyai agenda bersama-sama dalam pemberantasan korupsi.



Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung menerima kunjungan Ketua kelompok Persahabatan Parlemen Ukraina-Indonesia Volodymyr Vechenko.

Persoalan korupsi, kata Pramono bukan hanya persoalan di dalam negeri masing-masing negara tetapi lintas negara, karena dalam masalah ini kita melihat hubungan antar negara menjadi penting terutama dalam pencucian uang (*money laundry*). Para pelaku korupsi selalu menyimpan uangnya tidak di negara mereka sendiri, tetapi selalu menempatkan di negara lain yang aman.

Indonesia telah meratifikasi beberapa hal terkait gerakan anti korupsi dunia, dengan adanya KPK dan OJK sedang yang belum ada yaitu *Asset Recovery*. “Kalau kita sudah bisa meratifikasi hal ini, maka menjadi pintu awal untuk melakukan pembersihan terhadap seluruh kegiatan korupsi di Indonesia,” papar Pramono. (mp), foto : naefurodji/parle/hr.

Komisi V DPR Minta Kementerian PU Susun Program Prioritas

Komisi V DPR meminta Kementerian PU memprioritaskan anggaran kepada sektor strategis sehingga dapat menimbulkan *multiplier effect* bagi masyarakat sekitar. Hal itu mengemuka saat Komisi V DPR Raker dengan Menteri PU Djoko Kirmanto, di Gedung DPR, Senin, (21/10).

“Memang anggaran PU masih minim dan hanya mendapat tambahan belanja sebesar 9.2 Triliun, jadi total 84 Triliun, sebelumnya didalam nota keuangan RAPBN 2014 74.9 Triliun, namun masih ada *backlog* sebesar 35 Triliun,” ujar anggota DPR dari Partai Golkar Hetifah saat diwawancara oleh Parlemen.

Menurutnya, Pemerintah harus bekerja keras bagaimana mengaturnya dengan skala prioritas. “Misalnya saja

mengikuti arahan Presiden dengan memprioritaskan anggaran di daerah perbatasan maupun pulau terluar, dengan target yang terukur,” ujarnya.

Dia mengatakan, selama ini daerah perbatasan belum banyak terakses oleh pembangunan. “Jembatan juga harus diprioritaskan sehingga dapat terhubung, misalnya saja Sebatik belum ada jalan lingkar yang menyambung,” katanya.

Dia menambahkan, pemerintah harus memprioritaskan ketahanan pangan disamping adanya ketegasan jangan sampai lahan subur dialihfungsikan. Selain itu, investasi waduk dan irigasi. “Perlu dianggarkan maksimal untuk sumber daya air karena memang daya rusak air dapat menyebabkan banjir,” ujarnya.



Anggota Komisi V DPR Hetifah.

Hal senada disampaikan oleh anggota DPR Saleh Husin (Fraksi Hanura), dia mengatakan, meskipun kekurangan *backlog* sebesar Rp. 35 Triliun tetap perlu disusun skala prioritas pada sektor strategis seperti pembangunan jalan, SDA, maupun Cipta Karya. (si) foto:wy/parle.



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso saat menerima dua karateka pelajar peraih Emas dalam "4th Basel Open Masters 2013" di Swis.

Prestasi Lemkari Sangat Memanggakan

Mengukir prestasi dunia, mengharumkan nama bangsa. Inilah yang sangat membanggakan dari prestasi Lembaga Karate Do Indonesia (Lemkari). Atlet karate pelajar Indonesia berhasil menyabet 5 medali emas, 3 perak, dan 5 perunggu dalam "4th Basel Open Masters 2013" di Swis.

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso terharu dan sangat bangga saat menerima dua karateka pelajar peraih emas di ruang kerjanya, Kamis (24/10). Adalah Yolanda Luciana Tuasela (16 tahun) asal Jatim yang meraih medali emas untuk nomor kata perseorangan. Satu lagi penyabet medali emas adalah Ni Putu Rismayanti (13 tahun) asal Bali. Keduanya mengaku bangga mampu mengalahkan karateka pelajar dari seluruh dunia.

Di ruang kerja Priyo, keduanya memperagakan gerakan-gerakan karate dengan sangat baik. Priyo yang juga Ketua Umum PB Lemkari memberi apresiasi penuh terhadap dua karateka belia tersebut. Keduanya sudah juara di level dunia, bukan di tingkat regional seperti ASEAN atau Asia saja.

Dari 5 emas yang diraih atlet karateka Indonesia, 3 emas di antaranya disabet oleh atlet Lemkari.

"Yang membuat saya bangga sebagai Ketua Umum Lemkari adalah 3 emas di antaranya diambil oleh anak-anak kita, pelajar SMP dan SMA yang bisa menyabet medali emas dan mengalahkan beberapa delegasi karate hebat dari 29 negara dari 5 benua," kata Priyo. Ini kebanggaan bagi pengurus besar Lemkari. Bibit-bibit muda ini, lanjut Priyo, perlu terus dibina dengan harapan, kelak mereka akan berprestasi lagi di tingkat senior.

"Bibit-bibit hebat semacam ini harus kita semai. Kita beri semangat untuk memupuk bakatnya," ujar Priyo. Kejuaraan dunia karate antarpelajar ini, diikuti 29 negara, pada 16 Oktober 2013 lalu. Selain dua karateka berprestasi itu, ada pula dua karateka lainnya yang mengikuti kejuaraan ini. Ada Hans Saputra pelajar asal Surabaya Jatim dan Romario Satiamu pelajar asal Manado Sulut.

Yolanda saat dimintai komentarnya

mengaku bangga bisa membawa medali emas ke Tanah Air. Menurutnya, lawan yang paling sulit adalah saat ia bertanding di semifinal menghadapi karateka tuan rumah. Selanjutnya, pelajar SMAN 2 Sidoarjo itu ingin mempertahankan mahkota juaranya pada even yang akan datang.

Senada dengan Yolanda, Risma pelajar SMPN 2 Kintamani, juga tak bisa menutupi rasa bangganya atas prestasi yang diraih. Ia tak habis percaya bisa mengalahkan karateka yang juga sangat bagus dari negara-negara peserta. Risma berharap bisa manjadi kampion lagi di kejuaraan dunia.

Sementara itu, Denies Ibrahim pelatih karate dari Lemkari mengungkapkan, persiapan anak didiknya sangat memadai. Ini adalah buah dari latihan dan evaluasi yang biasa dilakukannya. Saat ini, katanya, para atlet yang baru selesai mengikuti kejuaraan dunia diberi kesempatan recovery dahulu. Selanjutnya, masuk program latihan kembali. Standar mereka sekarang sudah pada level dunia. (mh), foto : wy/parle/hr.



Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menerima Pandangan Fraksi tentang RUU Usul Inisiatif Daerah Otonomi Baru dari Anggota DPR RI Bukhori Yusuf, Kamis (24/10). (foto: hr/parle)



Wakil Ketua DPR RI Sohibul Iman menyerahkan naskah RAPBN 2014 dari Menteri Keuangan Chatib Basri dalam Sidang Paripurna DPR RI. Jumat (25/10). (foto: wy/parle)



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menyerahkan palu kepemimpinan kepada Wakil Ketua BURT yang baru Adjeng Ratna Suminar dan foto bersama Pimpinan BURT dan Anggota BURT, Kamis (24/10). (foto: rizka/parle)



Komisi IX DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi Ribka Tjiptaning Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Ketua Forum Komunikasi Bidan PTT, Ikatan Bidan Indonesia, Perawat, dan Dokter membahas permasalahan Bidan PTT, Kamis (24/10). (foto: naefuroji/parle)

